



PEMERINTAH KABUPATEN PEMALANG
DINAS LINGKUNGAN HIDUP

RENJA RENCANA KERJA



2025

KATA PENGANTAR

Puji syukur ke hadirat Allah SWT, yang telah memberikan karunia dan atas ijin-Nya Rencana Kerja (Renja) Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pemalang Tahun 2025 dapat disusun dengan baik. Dokumen Renja merupakan dokumen perencanaan yang menjadi dasar dalam pelaksanaan program dan kegiatan pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pemalang Tahun 2025. Renja disusun dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sebagai penjabaran dari RENSTRA Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pemalang dan mengacu kepada RKPD yang telah disahkan. Dokumen Renja menjabarkan tentang tujuan, sasaran, target program dan kegiatan sesuai dengan tugas pokok fungsinya.

Penyusunan Rencana Kerja (Renja) merupakan penjabaran dari Peraturan Bupati Pemalang Nomor 35 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2021-2026 yang disusun berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Semoga dokumen Renja ini dapat dijadikan bahan pertimbangan serta pedoman bagi Dinas Lingkungan Hidup untuk tetap konsisten dalam menjalankan tugas dan fungsinya sebagai pengelola lingkungan hidup yang selalu berupaya mengedepankan inovasi dan kreasi guna meningkatkan kinerjanya dalam melayani publik. Masukan mengenai penyempurnaan Renja pada Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2025 sangat diharapkan agar kinerja perangkat daerah ini di masa yang akan datang dapat meningkat, sehingga dapat memberikan kontribusi yang lebih baik bagi keberhasilan program dan kegiatan Pemerintah Kabupaten Pemalang.

Pemalang, Juni 2024

KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP
KABUPATEN PEMALANG



Wiji Mulyati, S.K.M
NIP. 19700131 199303 2 003

DAFTAR ISI

DAFTAR ISIi

BAB 1 PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang1

1.2 Landasan Hukum.....3

1.3 Maksud dan Tujuan5

1.4 Sistematika Penulisan5

BAB 2 HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU6

2.1 Hasil Evaluasi Renja Perangkat Daerah Tahun lalu dan
Capaian Renstra Perangkat Daerah6

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah19

2.3 Hasil Evaluasi SAKIP19

2.4 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi
Perangkat Daerah.....20

2.5 Penelaahan Pemangku Kepentingan20

BAB 3 TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH.....35

3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional35

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah37

3.3 Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan38

BAB 4 RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH40

4.1 Rencana Pendanaan40

BAB 5 PENUTUP52

5.1 Kaidah Pelaksanaan52

5.2 Rencana Tindak lanjut53

BAB 1 PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Rencana Kerja Dinas Lingkungan Hidup merupakan dokumen perencanaan dan pendanaan yang berisi program dan kegiatan Dinas Lingkungan Hidup sebagai penjabaran dari RKPD dan Renstra Dinas Lingkungan Hidup dalam satu tahun anggaran disertai dana yang diperlukan untuk pelaksanaannya yang disusun berdasarkan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan secara teknis berpedoman pada Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Penyusunan Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 dalam hal pencantuman nomenklatur program, kegiatan, dan sub kegiatan mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah. Berdasarkan peraturan tersebut, maka nomenklatur, program, kegiatan, dan sub kegiatan, serta kodefikasi perangkat daerah telah ditentukan oleh pemerintah pusat dan dimungkinkan dilakukan pemutakhiran setiap tahunnya. Dalam sistem perencanaan pembangunan daerah, Renja Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2025 merupakan:

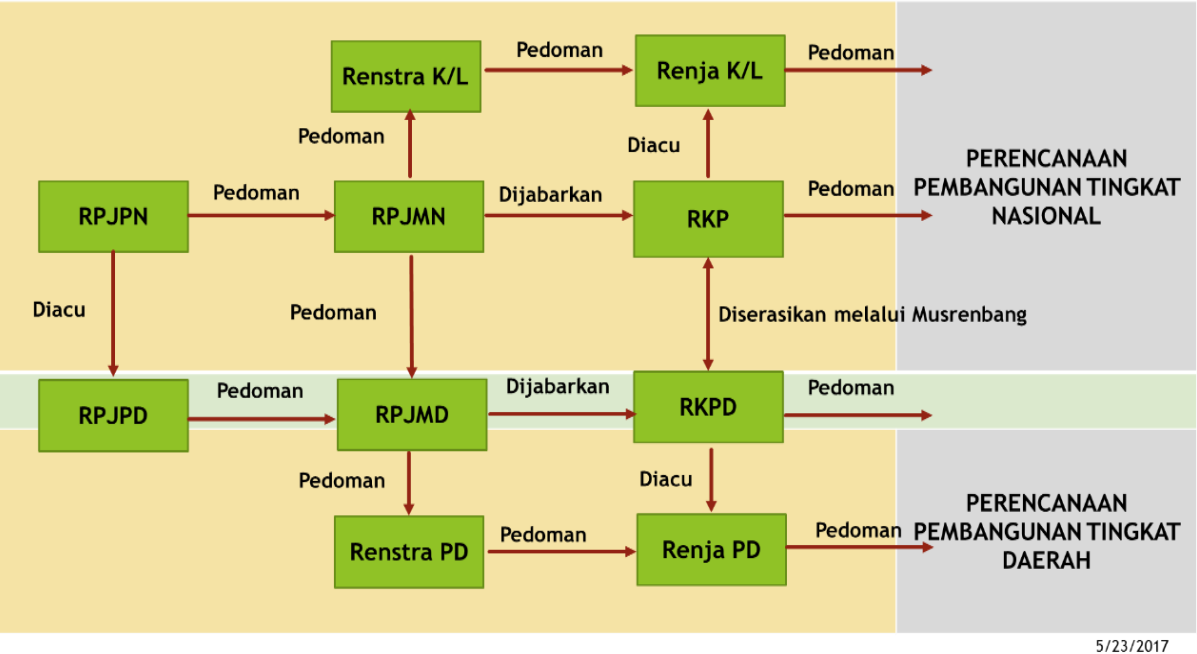
1. Pedoman bagi Dinas Lingkungan Hidup dalam pelaksanaan program, kegiatan, dan sub kegiatan Tahun 2025.
2. Alat untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan.

Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2025 ini mendasarkan pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2025, Rencana Strategis (Renstra) Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pemalang Tahun 2021-2026 dan hasil Forum Perangkat Daerah. Renja berfungsi sebagai pedoman dalam menyusun perencanaan teknis operasional Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang memuat tujuan dan sasaran, strategi, kebijakan program dan kegiatan pembangunan dalam periode 1 (satu) tahun, baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dalam mendorong partisipasi masyarakat.

Proses penyusunan Renja Perangkat Daerah dilakukan secara simultan dan sifatnya saling memberi masukan dengan proses penyusunan

RKPD. Secara lebih rinci, hubungan Renja (PD) dengan dokumen perencanaan lainnya dapat dilihat pada Gambar 1.1

Gambar 1.1 Proses Penyusunan Renja dan Dokumen Perencanaan lainnya



Rencana Kerja Perangkat Daerah disusun dengan mengacu pada kerangka arahan yang dirumuskan dalam RKPD serta didasarkan pada evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun sebelumnya dan evaluasi kinerja terhadap pencapaian Renstra Perangkat Daerah dan pada akhirnya Renja Perangkat Daerah digunakan sebagai dasar penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Perangkat Daerah (APBD).

Renja ini diharapkan dapat menjadi acuan kinerja perangkat daerah dan dapat dilaksanakan secara realistis serta dapat memenuhi fungsi akuntabilitas berdasarkan kemampuan keuangan daerah dan Sumber Daya Manusia di masing-masing OPD.

1.2. Landasan Hukum

Seiring pelaksanaan otonomi daerah, daerah memiliki wewenang yang lebih besar dalam mengelola pembangunan daerahnya, termasuk pengelolaan lingkungan hidup yang merupakan urusan wajib Kabupaten berdasarkan :

- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Ratifikasi Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita;
- Undang-undang Republik Indonesia No. 25 Tahun 2004 tentang sistem perencanaan pembangunan nasional;
- Undang-undang Republik Indonesia No. 33 Tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara pemerintahan pusat dan pemerintahan daerah;
- Undang-undang Republik Indonesia No. 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah;
- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;

- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta kerja;
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan antara Pemerintahan, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 8 Tahun 2008 tentang tahapan, tata cara penyusunan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah;
- Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
- Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
- Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
- Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
- Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan ;
- Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional;
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah;
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
- Peraturan Menteri Dalam Negeri No 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah No 13 Tahun 2019;
- Peraturan Menteri Dalam Negeri No 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
- Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 24 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Kabupaten Pemalang tahun 2005-2025;
- Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 15 tahun 2012 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Kabupaten Pemalang.
- Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 9 Tahun 2013 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Pemalang;

- Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pemalang.
- Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 6 tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Pemalang Tahun 2021-2026;
- Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 9 Tahun 2021 tentang Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Kabupaten Pemalang Tahun 2021-2050;
- Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 1 Tahun 2018 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pemalang Tahun 2018-2038;
- Peraturan Bupati Pemalang Nomor 63 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pemalang;
- Peraturan Bupati Pemalang Nomor 91 Tahun 2016 tentang Uraian Tugas Jabatan Struktural Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pemalang;
- Peraturan Bupati Pemalang Nomor 79 Tahun 2018 tentang Pembentukan Unit Kebersihan dan Persampahan pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pemalang;
- **Peraturan Bupati Pemalang Nomor 18 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Pemalang Tahun 2023.**

I.3. Maksud dan Tujuan

- a) Maksud dari penyusunan Rancangan Awal RENJA PD ini adalah sebagai berikut :
1. Menjamin konsistensi perencanaan, pemilihan Program, Kegiatan dan Sub kegiatan perangkat daerah untuk mendukung pencapaian visi misi pembangunan daerah.
 2. Menjamin keterpaduan arah kebijakan dan strategi RPJMD serta keselarasan Program, Kegiatan dan Sub kegiatan yang mengalami perubahan sesuai sasaran dalam rencana strategis Perangkat Daerah yang tertuang dalam Renja PD setiap tahunnya
 3. Sebagai alat untuk mengukur kinerja instansi
- b) Tujuan
- Tujuan disusunnya Rancangan Awal RENJA OPD ini adalah :
1. Mengevaluasi terhadap program dan kegiatan tahun sebelumnya sehingga dapat ditentukan apakah program dan kegiatan tersebut akan dilanjutkan atau dihentikan untuk tahun yang akan datang;
 2. Mengumpulkan rancangan atau usulan program serta kegiatan dari bidang dalam lingkungan kerja DLH Kabupaten Pemalang;
 3. Memilih, memilah dan menelaah rancangan atau usulan program serta kegiatan yang disusun berdasarkan skala prioritas;

I.4. Sistematika Penulisan

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Landasan Hukum
- 1.3. Maksud dan Tujuan
- 1.4. Sistematika Penulisan

BAB II	HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PD TAHUN LALU
2.1.	Evaluasi Pelaksanaan Renja PD Tahun Lalu dan Capaian Renstra PD
2.2.	Analisis Kinerja Pelayanan PD
2.3.	Hasil Evaluasi SAKIP
2.4.	Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi PD
BAB III	TUJUAN DAN SASARAN PD
3.1.	Telaahan terhadap kebijakan nasional dan Daerah
3.2.	Tujuan dan Sasaran Renja PD
3.3.	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan
BAB IV	RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH
4.1.	Rencana Kerja dan Pendanaan
BAB V	PENUTUP

BAB 2 HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DLH TAHUN LALU

Pelaksanaan evaluasi sebagai salah satu fungsi peningkatan kualitas kinerja instansi pemerintah, dilaksanakan guna mengetahui program/kegiatan yang tidak memenuhi target, telah memenuhi target ataupun melebihi target kinerja yang direncanakan sesuai dengan target kinerja dalam RENJA DLH Kabupaten Pemalang Tahun 2023 didasarkan pada Renstra DLH Kabupaten Pemalang Tahun 2021 - 2026 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Pemalang Tahun 2021-2026, untuk mengetahui :

- 1. Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja program/kegiatan;
- 2. Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra Perangkat Daerah, dan
- 3. Kebijakan/Tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut.

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja DLH Tahun 2023 dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Berikut ini adalah Evaluasi hasil pelaksanaan Renja Tahun 2023 dan Pencapaian Renstra DLH Kabupaten Pemalang sampai dengan Tahun 2023. Pada Tahun Anggaran 2023 DLH Kabupaten Pemalang melaksanakan urusan lingkungan hidup sebanyak 10 Program dengan 17 Kegiatan dan 41 Sub kegiatan dengan anggaran sebesar Rp. 36.294.375.000,- dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 2.1
Capaian Kinerja Program DLH Kab. Pemalang Tahun 2023

No	Indikator Kinerja Program	Satuan	Target Renstra 2021-2026	Target Renstra 2023	Realisasi 2023	
					Kinerja	Kuangan (%)
	PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP					
1	Persentase dokumen perencanaan lingkungan hidup yang disusun	%	100	100	100	75.70
	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP					
2	Persentase Kegiatan pengendalian pencemaran dan kerusakan LH yang dilaksanakan	%	100	100	75	72.39
3	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Kab/Kota	Nilai	69,67	69,07	66,29	59.09
4	Indeks Kualltas Air	Nilai	47,83	46,56	48,33	59.09
5	Indeks Kualitas Udara	Nilai	89,58	89,43	84,16	59.09
6	Indeks Tutupan Lahan	Nilai	70,02	70,08	64,09	59.09
	PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)					
7	Persentase Pengelolaan Kehati	%	100	100	75	36.46
	PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAHBAHAN BERBAHAYA DAN					

No	Indikator Kinerja Program	Satuan	Target Renstra 2021-2026	Target Renstra 2023	Realisasi 2023	
					Kinerja	Keuangan (%)
	BERACUN (LIMBAH B3)					
8	Persentase Pengendalian B3 & LB3	%	100	100	100	56.99
	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)					
9	Persentase kegiatan usahayang diawasi dan dibina	%	100	100	75	63.63
10	Ketaatan penanggung jawab usaha dan /atau kegiatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kab/Kota	%	30	28	90	63.63
	PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT					
11	Persentase kelompok masyarakat yang teredukasi	%	100	100	75	67.39
	PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT					
12	Persentase Penghargaan yang diberikan	%	100	100	75	47.93
	PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP					
13	Persentase Penanganan Pengaduan Masyarakat	%	100	100	100	30.97
	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN					
14	Persentase sampah yang terangkut	%	85	82	59.56	79.85
15	Terlaksananya pengelolaan sampah di wilayah Kab/Kota	%	77	75	85.38	24.72

Adapun capaian kinerja urusan lingkungan hidup yang telah dilaksanakan atau yang telah direalisasikan sesuai dengan pagu anggaran yang ditetapkan pada tahun 2023 adalah sebagai berikut :

Tabel 2.2
Capaian Kinerja Urusan Lingkungan Hidup Tahun 2023

No	IKU Pemerintah Kabupaten	No	IKU Perangkat Daerah	Satuan	Target RPJMD 2021-2026	Target 2023	Realisasi Capaian RKPD	Realisasi Capaian RPJMD	Tingkat Capaian RPJMD
							2023	s/d 2023	s/d 2023
1	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Daerah (IKLHD)			Indeks	69,82	69,07	66,29	66,29	94,95
		1	Persentase kepuasan masyarakat terhadap penanganan pencemaran dan kerusakan lingkungan	%	81	79	79	100	100
		2	Skor indeks pencemaran udara	Indeks	89,58	89,43	84,16	84,16	94,11

No	IKU Pemerintah Kabupaten	No	IKU Perangkat Daerah	Satuan	Target RPJMD 2021-2026	Target 2023	Realisasi Capaian RKPD	Realisasi Capaian RPJMD	Tingkat Capaian RPJMD
							2023	s/d 2023	s/d 2023
		3	Skor indeks pencemaran air	Indeks	47,83	46,56	48,33	48,33	103,80
		4	Persentase ketersediaan dokumen lingkungan dan kajian teknis lingkungan	%	100	100	100	100	100
		5	Persentase kegiatan usaha/kegiatan yang diawasi dan dibina	%	100	100	100	100	100
		6	Penyelesaian kasus lingkungan	%	100	100	100	100	100
		7	Persentase masyarakat yang aktif mengelola lingkungan	%	100	20	20	20	100
		8	Persentase luasan Ruang Terbuka Hijau (RTH) publik	%	43,096	43,78	43,78	43,78	100
		9	Persentase penanganan lahan kritis	%	0.0863	0.0463	0.0463	0.0463	100
		10	Kualitas pengelolaan sampah di wilayah Kab. Pematang	%	100	98,8	85.38	85.38	85.38
		11	Persentase Penanganan sampah	%	70,00	72,92	59.50	59.50	59.50
		12	Persentase pengurangan sampah	%	30,00	25,88	25.88	25.88	25.88

Tabel 2.2 Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja DLH dan Pencapaian Renstra DLH Kabupaten Pemalang s/d Triwulan II Tahun 2024

Nama Perangkat Daerah : Dinas Lingkungan Hidup

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan/ Sub Kegiatan		Target Kinerja dan Anggaran (TAHUN 2024)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renja OPD Pada Triwulan (TAHUN 2024]						Capaian Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra OPD (TAHUN 2024)	
			Penetapan		I		II		TOTAL		%	
3	4		6		7		8		(11=7+8+9+10)		(12=11/6*100)	
	Indikator	Satuan	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	SAKIP	nilai	62,01	19.387.211	0,00	3.976.435	0,00	5.402.708	0,00	9.379.143	0,00	48,38
Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase dokumen Perencanaan,Penganggaran dan evaluasi Kinerja PD	%	100	18.000	25,00	6.413	0,00	2.800	25,00	9.213	25,00	51,18
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	dokumen	8	12.000	3	3.781	2	2.800	5	6.581	62,50	54,84
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	laporan	1	6.000	1	2.632	0	-	1	2.632	100,00	43,87
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase dukungan kelancaran administrasi keuangan	%	100	14.621.838	25,00	2.960.332	0,00	5.399.908	25,00	8.360.240	25,00	57,18
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	orang/ bulan	12	14.605.838	3	2.960.332	3	5.394.218	6	8.354.550	50,00	57,20

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan/ Sub Kegiatan		Target Kinerja dan Anggaran (TAHUN 2024)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renja OPD Pada Triwulan (TAHUN 2024)						Capaian Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra OPD (TAHUN 2024)	
			Penetapan		I		II		TOTAL		%	
3	4		6		7		8		(11=7+8+9+10)		(12=11/6*100)	
	Indikator	Satuan	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	laporan	1	6.000	0	-	1	5.690	1	5.690	100,00	94,83
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan /Triwulanan/Semesteran SKPD	laporan	1	5.000	0	-	0	-	0	-	0,00	0,00
Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	laporan	1	5.000	0	-	0	-	0	-	0,00	0,00
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Terselenggaranya Administrasi Kepegawaian perangkat Daerah	%	100	342.000	25,00	7.185	0,00	253.239	25	260.423	25,00	76,15
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	paket	1	314.000	0	7.185	1	253.239	1	260.423	100,00	82,94
Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	dokumen	1	28.000	0	-	0	-	0	-	0,00	0,00
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terselenggaranya Administrasi Umum perangkat daerah	%	100	284.763	25,00	77.816	0,00	78.078	25,00	155.894	25,00	54,75

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan/ Sub Kegiatan		Target Kinerja dan Anggaran (TAHUN 2024)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renja OPD Pada Triwulan (TAHUN 2024)						Capaian Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra OPD (TAHUN 2024)	
					I		II		TOTAL		%	
					Penetapan							
3	4		6		7		8		(11=7+8+9+10)		(12=11/6*100)	
	Indikator	Satuan	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	paket	6	3.100	1	345	2	990	3	1.335	50,00	43,06
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	paket	14	7.000	1	400	8	3.878	9	4.278	64,29	61,11
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	paket/bulan	12	129.890	3	32.252	3	27.995	6	60.246	50,00	46,38
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	paket	12	14.000	3	1.928	3	1.957	6	3.885	50,00	27,75
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang - Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	dokumen	2	11.860	0	2.700	0	2.550	0	5.250	0,00	44,27
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	laporan	90	118.913	31	40.191	32	40.709	63	80.900	70,00	68,03
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	%	100	23.017	25,00	-	0,00	22.635	25,00	22.635	25,00	98,34
Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	unit	3	23.017	0	-	3	22.635	3	22.635	100,00	98,34

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan/ Sub Kegiatan		Target Kinerja dan Anggaran (TAHUN 2024)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renja OPD Pada Triwulan (TAHUN 2024)						Capaian Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra OPD (TAHUN 2024)	
			Penetapan		I		II		TOTAL		%	
3	4		6		7		8		(11=7+8+9+10)		(12=11/6*100)	
	Indikator	Satuan	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Terselenggaranya Jasa Penunjang urusan Pemerintah Daerah	%	100	3.981.771	25,00	896.447	0,00	882.155	25,00	1.778.602	25,00	44,67
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	laporan	6	5.140	1	200	2	1.550	3	1.750	50,00	34,05
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya, Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	laporan	12	251.519	3	43.595	3	45.563	6	89.158	50,00	35,45
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	laporan	12	3.725.112	3	852.652	3	835.042	6	1.687.694	50,00	45,31
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terselenggaranya pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang urusan Pemerintah Daerah	%	100	115.823	25,00	28.244	0,00	25.909	25,00	54.152	25,00	46,75
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas, Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	unit	31	81.558	4	20.727	12	19.835	16	40.561	51,61	49,73
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	unit	10	4.740	4	1.619	1	332	5	1.951	50,00	41,16
Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	unit	2	23.280	1	4.739	0	3.610	1	8.349	50,00	35,86

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan/ Sub Kegiatan		Target Kinerja dan Anggaran (TAHUN 2024)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renja OPD Pada Triwulan (TAHUN 2024)						Capaian Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra OPD (TAHUN 2024)	
			Penetapan		I		II		TOTAL		%	
3	4		6		7		8		(11=7+8+9+10)		(12=11/6*100)	
	Indikator	Satuan	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.
Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	unit	9	6.245	2	1.159	3	2.132	5	3.291	55,56	52,70
Program Perencanaan Lingkungan Hidup	Persentase dokumen perencanaan lingkungan hidup yang disusun	%	100,00	200.000	25,00	15.115	0,00	8.720	25,00	23.835	25,00	11,92
Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/ Kota	Persentase tersedianya Dokumen RPPLH	%	100	150.000	25,00	10.798	0,00	6.680	25,00	17.477	25,00	11,65
Pengendalian pelaksanaan RPPLH Kabupaten/ Kota	Jumlah Dokumen Telaahan Kebijakan yang Telah Mengakomodir RPPLH Kabupaten/Kota	dokumen	2	150.000	0	10.798	0	6.680	0	17.477	0,00	11,65
Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten/ Kota	Terselenggaranya Dokumen KLHS	%	100	50.000	25,00	4.317	0,00	2.040	25,00	6.357	25,00	12,71
Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS Rencana Tata Ruang	Jumlah Dokumen KLHS Rencana Tata Ruang Kabupaten/Kota yang disusun	dokumen	1	50.000	0	4.317	0	2.040	0	6.357	0,00	12,71
Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkugan Hidup	Persentase Kegiatan pengendalian pencemaran dan kerusakan LH yang dilaksanakan	%	100,00	270.000	25,00	42.365	0,00	12.390	25,00	54.755	25,00	20,28
	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Kab/Kota	nilai	69,52	65.000		14.276		6.312	66,29	20.587	95,35	31,67
	Indeks Kualitas Air	nilai	47,59						48,33		101,55	
	Indeks Kualitas Udara	nilai	89,53						84,16		94,00	
	Indeks Kualitas Lahan	nilai	70,16						64,09		91,35	

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan/ Sub Kegiatan		Target Kinerja dan Anggaran (TAHUN 2024)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renja OPD Pada Triwulan (TAHUN 2024)						Capaian Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra OPD (TAHUN 2024)	
			Penetapan		I		II		TOTAL		%	
3	4		6		7		8		(11=7+8+9+10)		(12=11/6*100)	
	Indikator	Satuan	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.
Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/ Kota	Persentase terlaksananya kegiatan pencegahan pencemaran dan kerusakan LH	%	100	335.000	25,00	56.641	0,00	18.702	25,00	75.342	25,00	22,49
Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara dan Laut	Jumlah Dokumen Uji Kualitas Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	dokumen	2	40.000	0	11.710	0	6.312	0	18.022	0,00	45,05
Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Inventarisasi Gas Rumah Kaca dari Sektor Lingkungan Hidup yang Dilaksanakan	dokumen	1	25.000	0	2.566	0	-	0	2.566	0,00	10,26
Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Jumlah Pengambilan Contoh Uji, Pengujian Parameter Kualitas Lingkungan dan Dokumen Mutu yang Dilaksanakan	dokumen	1	270.000	0	42.365	0	12.390	0	54.755	0,00	20,28
Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KEHATI)	Persentase Pengelolaan Kehati	%	100,00	30.000	25,00	3.078	0,00	10.560	25,00	13.638	25,00	45,46
Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/ Kota	Persentase Pengelolaan Kehati	%	100	30.000	25,00	3.078	0,00	10.560	25,00	13.638	25,00	45,46
Penyusunan dan Penetapan Rencana Pengelolaan Keanekaragaman Hayati	Jumlah Dokumen Rencana Induk Pengelolaan Kehati yang Disusun	dokumen	1	30.000	0	3.078	0	10.560	0	13.638	0,00	45,46
Program Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah	Persentase Pengendalian B3 & LB3	%	100,00	10.000	25,00	976	0,00	-	25,00	976	25,00	9,76

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan/ Sub Kegiatan		Target Kinerja dan Anggaran (TAHUN 2024)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renja OPD Pada Triwulan (TAHUN 2024)						Capaian Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra OPD (TAHUN 2024)	
					I		II		TOTAL		%	
					Penetapan							
3	4		6		7		8		(11=7+8+9+10)		(12=11/6*100)	
	Indikator	Satuan	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.
Bahan Berbahaya dan Beracun Limbah (B3)												
Penyimpanan Sementara Limbah B3	Persentase Penyimpanan sementara LB3	%	100	10.000	22,00	976	0,00	-	22,00	976	22,00	9,76
Verifikasi Lapangan untuk Memastikan Pemenuhan Persyaratan Administrasi dan Teknis Penyimpanan Sementara Limbah B3	Jumlah Laporan Kegiatan Verifikasi Lapangan Pemenuhan Komitmen Persetujuan/Izin Penyimpanan sementara dan Pengumpulan Limbah B3	laporan	20	10.000	0	976	0	-	0	976	0,00	9,76
Program Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)	Persentase kegiatan usaha yang diawasi dan dibina	%	100,00	50.000	25,00	5.049	0,00	5.463	25,00	10.512	25,00	21,02
	Ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kab/Kota	%	29,00		0,00		0,00		30		103,45	
Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Perlindungan dan Izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase kegiatan usaha yang diawasi dan dibina	%	100	50.000	25,00	5.049	0,00	5.463	25,00	10.512	25,00	21,02

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan/ Sub Kegiatan		Target Kinerja dan Anggaran (TAHUN 2024)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renja OPD Pada Triwulan (TAHUN 2024)						Capaian Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra OPD (TAHUN 2024)	
					I		II		TOTAL		%	
			Penetapan									
3	4		6		7		8		(11=7+8+9+10)		(12=11/6*100)	
	Indikator	Satuan	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.
Pengawasan Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan Hidup, Izin PPLH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Laporan Dari Usaha dan/atau Kegiatan yang Diawasi Izin Lingkungan, Persetujuan Lingkungan, Surat Kelayakan Operasi oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	laporan	25	50.000	1	5.049	5	5.463	6	10.512	24,00	21,02
Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat	Persentase kelompok masyarakat yang teredukasi	%	100,00	700.000	25,00	11.093	0,00	27.584	25,00	38.677	25,00	5,53
Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase kelompok masyarakat yang teredukasi	%	100	700.000	25,00	11.093	0,00	27.584	25,00	38.677	25,00	5,53
Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup	Jumlah Pendampingan Pembinaan Gerakan Peduli dan Berbudaya Lingkungan Hidup yang Dilaksanakan	dokumen	6	150.000	0	8.603	1	11.975	1	20.579	16,67	13,72
Penyelenggaraan Penyuluhan Dan Kampanye Lingkungan Hidup	Jumlah Masyarakat/Kelompok Masyarakat/Pelaku Usaha/Kegiatan yang terlibat	orang	150	200.000	0	-	10	11.948	10	11.948	6,67	5,97
Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Bidang lingkungan hidup untuk Lembaga pendidikan formal/ lembaga masyarakat/ komunitas/ kelompok masyarakat	Jumlah lembaga pendidikan formal/lembaga masyarakat/ komunitas/kelompok masyarakat yang meningkat kapasitas dan kompetensinya terkait PPLH	lembaga	6	350.000	0	2.490	0	3.661	0	6.151	0,00	1,76

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan/ Sub Kegiatan		Target Kinerja dan Anggaran (TAHUN 2024)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renja OPD Pada Triwulan (TAHUN 2024)						Capaian Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra OPD (TAHUN 2024)	
					I		II		TOTAL		%	
3	4		6		7		8		(11=7+8+9+10)		(12=11/6*100)	
	Indikator	Satuan	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.
Program Penghargaan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat	Persentase Penghargaan yang diberikan	%	100,00	35.000	25,00	6.790	0,00	6.230	25,00	13.020	25,00	37,20
Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase Penghargaan yang diberikan	%	100	35.000	25,00	6.790	0,00	6.230	25,00	13.020	25,00	37,20
Penilaian Kinerja Masyarakat/ Lembaga Masyarakat/ Dunia Usaha/ Dunia Pendidikan/ Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Jumlah Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi yang Dinilai Kinerjanya dalam rangka PPLH	entitas	10	35.000	4	6.790	0	6.230	4	13.020	40,00	37,20
Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup	Persentase Penanganan Pengaduan Masyarakat	%	100,00	15.000	25,00	626	0,00	730	25,00	1.356	25,00	9,04
Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/ Kota	Persentase Pengaduan Masyarakat yang ditindaklanjuti (%)	%	100	15.000	25,00	626	0,00	730	25,00	1.356	25,00	9,04
Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap PPLH Kabupaten/ Kota	Jumlah Pengaduan Masyarakat Terhadap PPLH Kabupaten/Kota yang Ditindaklanjuti/Ditangani	pengaduan	10	15.000	1	626	0	730	1	1.356	10,00	9,04
Program Pengelolaan Persampahan	Persentase sampah yang terangkut	%	83,00	5.843.574	20,75	734.033	0,00	1.813.559	20,75	2.547.591	25,00	43,60
	Terlaksananya pengelolaan sampah di wilayah Kab/Kota	%	76,00	1.035.000	19,00	218.866	0,00	104.747	19,00	323.613	25,00	31,27
Pengelolaan Sampah	Persentase sampah yang dikelola secara 3R	%	24	6.878.574	6,47	952.899	6,47	1.911.508	25,88	2.864.407	107,83	41,64

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan/ Sub Kegiatan		Target Kinerja dan Anggaran (TAHUN 2024)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renja OPD Pada Triwulan (TAHUN 2024)						Capaian Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra OPD (TAHUN 2024)	
			Penetapan		I		II		TOTAL		%	
3	4		6		7		8		(11=7+8+9+10)		(12=11/6*100)	
	Indikator	Satuan	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.
Peningkatan Peran Serta Masyarakat Dalam Pengelolaan Persampahan	Jumlah Masyarakat, Kelompok Masyarakat atau Para Pihak Lainnya yang Terlibat Aktif dalam Kegiatan Pengelolaan Sampah Berbasis Masyarakat	kelompok	10	240.000	0	-	3	73.400	3	73.400	30,00	30,58
Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/ TPST/ SPA/ Kabupaten/ Kota	Jumlah Sarana dan Prasarana Penanganan Sampah untuk Kegiatan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir	unit	147	720.000	0	203.270	47	21.374	47	224.644	31,97	31,20
Penyusunan Rencana, Kebijakan Dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen kebijakan dan strategi daerah pengelolaan sampah kabupaten/kota yang disusun dan ditetapkan	dokumen	1	50.000	0	15.596	0	3.176	0	18.772	0,00	37,54
Penanganan Sampah Melalui Pengangkutan	Jumlah sampah yang tertangani melalui proses pengangkutan	ton	82000	5.843.574	13448	734.033	19848	1.813.559	33.296	2.547.591	40,61	43,60
Pengurangan Sampah Melalui Pendaauran Ulang Sampah	Jumlah sampah yang terdaur ulang	ton	56982	25.000	12300	-	3500	6.798	15.800	6.798	27,73	27,19
JUMLAH ANGGARAN				27.640.785		5.028.702		7.399.001		12.427.703		

II.2. Analisis Kinerja Pelayanan DLH

Berdasarkan RPJMD Kabupaten Pemalang Tahun 2021 – 2026, indikator kinerja urusan lingkungan hidup adalah Meningkatnya kualitas dan fungsi lingkungan hidup melalui upaya pencegahan dan pengendalian pencemaran serta peningkatan tutupan lahan. Indikator kinerja beserta target dan capaian realisasinya secara rinci dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 2.6 Pencapaian Kinerja Pelayanan DLH Kabupaten Pemalang

No.	Indikator	Satuan	SPM	IKU	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah					Realisasi Capaian			Proyeksi		Catatan Analisis
						2021	2022	2023	2024	2025	2021	2022	2023	2024	2025	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	14	11	12	13	13	14	15
1	Persentase kepuasan masyarakat terhadap penanganan pencemaran dan kerusakan lingkungan	%				78,92	79,92	80,92	81,92	80,84	78,92	79,92	80,92	81,92	80,84	Proyeksi disamakan dengan target
2	Skor indeks pencemaran udara	Indeks				85,62	89,37	89,43	89,48	89,58	85,62	84,16	89,43	89,48	89,58	
3	Skor indeks pencemaran air	Indeks				47,33	46,24	46,56	47,28	47,83	47,33	48,33	46,56	47,28	47,83	
4	Persentase ketersediaan dokumen lingkungan dan	%				100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	
5	Persentase kegiatan usaha/kegiatan yang diawasi dan dibina	%				100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	
6	Penyelesaian kasus lingkungan	%				100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	
7	Persentase masyarakat yang aktif mengelola lingkungan	%				50	60	70	80	100	40	40	40	40	100	
8	Persentase luasan Ruang Terbuka Hijau (RTH) publik	%				43,070	43,074	43,078	43,083	43,092	43,070	43,074	43,078	43,083	43,092	
9	Persentase penanganan lahan kritis	%				0,0263	0,0363	0,0463	0,0563	0,0763	0,0263	0,0363	0,0463	0,0563	0,0763	
10	Kualitas pengelolaan sampah di wilayah Kab.	%				71,43	78,57	78,57	85,71	92,86	71,43	78,57	78,57	85,71	92,86	

No.	Indikator	Satuan	SPM	IKU	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah					Realisasi Capaian			Proyeksi		Catatan Analisis
						2021	2022	2023	2024	2025	2021	2022	2023	2024	2025	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	14	11	12	13	13	14	15
11	Persentase Penanganan sampah	%				74.97	73,99	72,92	71,83	70,00	74.97	73,99	73,99	72,92	70,00	
12	Persentase pengurangan sampah	%				22.88	23,94	25,88	26,94	30,00	22.88	23,94	23,94	25,88	30,00	

Berdasarkan hasil evaluasi SAKIP DLH tahun 2023. Terdapat beberapa rekomendasi langkah langkah perbaikan yang harus dilaksanakan oleh DLH, antara lain :

1. Mempublikasikan dokumen perencanaan kinerja dan laporan kinerja pada website DLH.
2. Menyusun pedoman pelaksanaan monitoring dan evaluasi capaian kinerja yang antaranya
 - Tata cara pengumpulan data kinerja
 - Tata cara pengukuran capaian kinerja.
3. Pengukuran capaian kinerja dijadikan dasar dalam penyesuaian strategi dan kebijakan dalam mencapai kinerja yang efektif dan efisien.
4. Melakukan monitoring dan evaluasi capaian kinerja secara berkala dengan menggunakan pedoman pelaksanaan monitoring dan evaluasi kinerja.

Tabel 2.7
Hasil Evaluasi SAKIP Tahun 2023

No.	Uraian Hasil Evaluasi	Bobot	Nilai
1.	Perencanaan Kinerja	30 %	18,60
2.	Pengukuran Kinerja	30 %	20,04
3.	Pelaporan Kinerja	15 %	10,05
4.	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	25 %	13,75
	Jumlah	100 %	63,25

II.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi DLH

Eksistensi sebuah institusi bergantung sejauh mana institusi tersebut mampu mengenali dan merespon isu strategis dengan berbagai kebijakan dan tindakan yang tepat. Secara umum isu strategis dapat bersumber dari lingkungan eksternal maupun lingkungan internal. Isu-isu strategis yang melingkupi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pemalang sebagai bagian dari Perangkat Daerah yang memiliki tujuan “Meningkatkan pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup” dan ” Meningkatkan kinerja pelayanan Dinas Lingkungan Hidup,” antara lain sebagai berikut:

1. Pelanggaran tata ruang
Proses alih fungsi lahan pertanian menjadi lahan non pertanian seperti kawasan pemukiman dan industri beberapa tahun terakhir ini terus meningkat tanpa mengindahkan Rencana Tata Ruang dan Wilayah (RTRW). Beberapa pelanggaran juga terjadi terhadap area hutan, sempadan sungai, dan sempadan pantai. Kondisi ini dapat berdampak pada menurunnya luas tutupan vegetasi dan Ruang Terbuka Hijau (RTH), meningkatnya lahan kritis, serta kerusakan ekosistem seperti ekosistem sungai, karst dan gumuk pasir.

2. Menurunnya fungsi ekologi

Penurunan daya dukung lingkungan akibat rusaknya ekosistem menimbulkan berbagai dampak baik langsung maupun tidak langsung. Dampak langsung tersebut antara lain, erosi tanah, longsor, debit air sungai yang tidak mantap, dan ancaman banjir pada saat musim penghujan terutama di daerah bantaran sungai. Sedangkan dampak tidak langsung antara lain penurunan resapan air dan erosi tanah berakibat pada penurunan kualitas dan kuantitas air tanah. Selain itu juga terjadi ancaman terhadap keanekaragaman hayati, baik yang ada di daratan seperti keragaman tanaman endemik, satwa mamalia, burung, dan serangga maupun kelangsungan hidup terumbu karang, mangrove, dan vegetasi pantai.

3. Meningkatnya pencemaran lingkungan

Seiring dengan laju urbanisasi dan peningkatan taraf hidup masyarakat, aktivitas pemenuhan kebutuhan hidup menjadi semakin kompleks dan tidak terkendali sehingga seringkali mengabaikan aspek – aspek lingkungan. Dampaknya antara lain terjadinya pencemaran air dan air tanah yang berasal dari kegiatan industri, limbah domestik, penggunaan pestisida dan bahan kimia dari aktivitas pertanian; pencemaran bakteri coli dari aktivitas peternakan, serta pencemaran udara akibat emisi kendaraan bermotor dan aktivitas industri. Hal – hal tersebut di atas tentunya dapat mengakibatkan penurunan kualitas lingkungan dan dapat merugikan kesehatan.

4. Peningkatan volume sampah

Meningkatnya volume sampah padat baik organik, anorganik maupun limbah B3 Dengan bertambahnya populasi penduduk namun tidak diimbangi dengan kesadaran lingkungan yang baik mengakibatkan tingginya timbulan sampah yang dihasilkan. Penanganan sampah masih bersifat jangka pendek dengan cara *open dumping*. Hal ini juga diperparah dengan minimnya lokasi tempat pengumpulan sampah (TPS) sementara dan lemahnya manajemen pengelolaan sampah di lingkungan masing - masing. Pada akhirnya, penanganan sampah dibebankan pada TPA Pegongsoran yang daya tampungnya semakin menurun karena adanya keterbatasan lahan.

5. Fenomena pemanasan global (*global warming*) dan perubahan iklim (*climate change*)

Akibat dari adanya pemanasan global antara lain adalah perubahan musim yang tidak menentu. Hal ini menyebabkan terganggunya keseimbangan ekosistem hutan, pola pemanfaatan sumber daya hutan, dan meningkatnya resiko kegagalan program rehabilitasi.

Penyelenggaraan tugas dan fungsi DLH Kabupaten Pemalang tidak lepas dari permasalahan maupun isu-isu yang berkembang secara dinamis baik dalam pemerintahan maupun masyarakat. Berbagai permasalahan maupun isu-isu yang berkembang dalam penyelenggaraan pelayanan yang berkaitan dengan pelaksanaan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang lingkungan hidup, berikut hambatan dan permasalahan yang ada di kabupaten Pemalang :

Tabel 2.8 Permasalahan dan Hambatan dalam Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi DLH Kabupaten Pemalang

Tusi PD	Permasalahan	Faktor Penghambat dan Pendorong
Tugas: 1. Urusan Perencanaan Lingkungan Hidup yaitu menyusun Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH); 2. Urusan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) yaitu menyusun Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) untuk Kebijakan, Rencana dan Program (KRP) Kabupaten. 3. Urusan Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup dalam Daerah Kabupaten. 4. Urusan Keanekaragaman Hayati (Kehati) Kabupaten. 5. Urusan Bahan Berbahaya dan Beracun (B3), dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3) 6. Urusan Pembinaan dan Pengawasan terhadap izin lingkungan dan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup (PPLH) yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah 7. Urusan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan tingkat Daerah. 8. Urusan Penghargaan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat tingkat Daerah. 9. Urusan Pengaduan Lingkungan Hidup. 10. Urusan Persampahan Fungsi: a) Perumusan kebijakan sesuai dengan lingkup tugasnya; b) Pelaksanaan kebijakan sesuai dengan lingkup tugasnya; c) Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugasnya; d) Pelaksanaan administrasi dinas	Permasalahan: 1. Meningkatnya pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup. 2. Kurangnya upaya pemulihan lingkungan hidup. 3. Belum optimalnya kinerja pengelolaan persampahan	Faktor Penghambat: 1. Rendahnya ketaatan pelaku usaha terhadap peraturan bidang lingkungan hidup 2. Meningkatnya laju pertumbuhan dan perpindahan penduduk 3. Meningkatnya alih fungsi lahan menjadi kawasan permukiman dan industri. 4. Laju pencemaran dan perusakan lingkungan yang tidak sebanding dengan upaya pengendalian dan pemulihan. 5. Pengendalian lingkungan ditengah Pandemi Covid-19. 6. Jumlah personil / Sumber Daya Manusia khususnya SDM Teknis seperti tenaga pengawas lapangan yang masih kurang. 7. Kurangnya sarana prasarana labolatorium lingkungan dan SDM yang menguasai bidang labolatorium lingkungan. 8. Pengaduan masyarakat bersifat pasif atau menunggu laporan dari masyarakat. 9. Kurangnya armada/ dumptruk, kurangnya sarana prasarana perlengkapan pengangkutan persampahan yang dilengkapi dengan kecanggihan teknologi, serta kurangnya alat berat buldozer maupun ekskavator Faktor Pendorong: 1. Tersedianya dana APBD dan APBN dibidang lingkungan hidup. 2. Lingkungan hidup menjadi salah satu aspek penting dalam pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan

Tusi PD	Permasalahan	Faktor Penghambat dan Pendorong
sesuai dengan lingkup tugasnya;		3. Dukungan kebijakan dan regulasi dibidang lingkungan hidup baik dari pemerintah pusat, provinsi maupun daerah. 4. Tersedianya PPLHD sebagai instrument pengawasan. 5. Tersedianya instrumen yang dapat meningkatkan kinerja lingkungan industri dan masyarakat seperti program PROPER, ADIPURA, ADIWIYATA, KALPATARU, dll 6. Adanya sektor Dukungan penyelenggaraan pelatihan dibidang lingkungan hidup 7. Tersedianya sarana dan prasarana yang mendukung 8. Adanya program CSR perusahaan yang mendukung pengelolaan lingkungan

Dengan memperhatikan hal – hal tersebut di atas maka isu-isu penting berupa rekomendasi dan catatan yang strategis untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan prioritas DLH Kabupaten Pemalang tahun 2024 adalah sebagai berikut :

1. Semakin meningkatnya pencemaran lingkungan yang banyak dihasilkan oleh kegiatan rumah tangga, industri, rumah sakit, perhotelan, transportasi, dan pertokoan sehingga perlu adanya upaya pengendalian pencemaran baik air, tanah, maupun udara.
2. Belum adanya pejabat fungsional PPNS dan terbatasnya pejabat PPLHD mengakibatkan lemahnya penataan peraturan dan belum optimalnya penegakan hukum di bidang lingkungan hidup;
3. Penguatan kapasitas operasional laboratorium lingkungan;
4. Kurangnya kesadaran & partisipasi pelaku usaha dan masyarakat dalam pengelolaan lingkungan hidup;
5. Kurangnya upaya konservasi dan restorasi lingkungan hidup;
6. Masalah Persampahan yang semakin kompleks perlu adanya Peningkatan kinerja pengelolaan persampahan;
7. Pemanasan global.

II.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD

Tabel 2.9 Review terhadap Rancangan Awal RKPD

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				18,790,640,000	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				19,437,640,000	
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				25,000,000	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				25,000,000	
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		Terkordinirnya penyusunan dokumen perencanaan Perangkat Daerah	7 dokumen	15,000,000	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		Terkordinirnya penyusunan dokumen perencanaan Perangkat Daerah	7 dokumen	15,000,000	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 laporan	10,000,000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 laporan	10,000,000	
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				14,397,272,000	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				14,397,272,000	
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	172 orang / bulan	14,367,272,000	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	172 orang / bulan	14,367,272,000	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD		Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 dokumen	10,000,000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD		Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 dokumen	10,000,000	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD		Jumlah Laporan Keuanga Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan La Koordinasi Penyusunan L Keuangan Bulanan/Triwulanan/Sem SKPD	1 dokumen	10,000,000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD		Jumlah Laporan Keuanga Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan La Koordinasi Penyusunan L Keuangan Bulanan/Triwulanan/Sem SKPD	1 dokumen	10,000,000	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran		Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1 dokumen	10,000,000	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran		Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1 dokumen	10,000,000	
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				218,500,000	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				218,500,000	
	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya		Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	1 Paket	200,000,000	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya		Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	1 Paket	200,000,000	
	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai		Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	1 dokumen	18,500,000	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai		Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	1 dokumen	18,500,000	
	Administrasi Umum Perangkat Daerah				416,576,000	Administrasi Umum Perangkat Daerah				462,000,000	
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 paket	8,374,600	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 paket	10,000,000	Antisipasi naiknya SSH penyediaan komponen listrik
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 paket	10,650,000	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 paket	12,000,000	
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga		Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 paket	5,545,400	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga		Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	2 paket	10,000,000	Jumlah paket meningkat
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 paket	160,000,000	Penyediaan Bahan Logistik Kantor		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 paket	180,000,000	Antisipasi kenaikan SSH penyediaan logistik kantor
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan		Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 paket	29,856,000	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan		Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 paket	40,000,000	Kualitas cetak dan penggandaan meningkat
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan		Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan yang Disediakan	1 dokumen	6,650,000	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan		Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan yang Disediakan	1 dokumen	10,000,000	Jumlah bacaan bertambah
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Jumlah laporan penyelenggaraan rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	200 lapora	195,500,000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Jumlah laporan penyelenggaraan rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	200 lapora	200,000,000	Antisipasi naiknya SSH komponen rakor
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				65,450,000	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				100,000,000	
	Pengadaan Mebel		Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	21 unit	48,450,000	Pengadaan Mebel		Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	30 unit	60,000,000	Jumlah unit bertambah

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	2 unit	17,000,000	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	4 unit	40,000,000	Jumlah unit bertambah
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				3,466,480,000	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				3,960,000,000	
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat		Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat	2500 lapor	10,000,000	Penyediaan Jasa Surat Menyurat		Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat	2500 lapor	10,000,000	
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 laporan	150,000,000	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 laporan	150,000,000	
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 laporan	3,306,480,000	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 laporan	3,800,000,000	Peningkatan jumlah penyediaan jasa pelayanan umum
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				201,362,000	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				275,000,000	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	28 unit	120,000,000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	28 unit	150,000,000	Kualitas pemeliharaan meningkat
	Pemeliharaan Mebel		Jumlah Mebel yang Dipelihara	2 unit	5,000,000	Pemeliharaan Mebel		Jumlah Mebel yang Dipelihara	2 unit	5,000,000	
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	9 unit	9,982,000	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	9 unit	10,000,000	Kualitas pemeliharaan meningkat
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	3 unit	58,200,000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	3 unit	100,000,000	Kualitas pemeliharaan meningkat
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	12 unit	8,180,000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	12 unit	10,000,000	Kualitas pemeliharaan meningkat

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
	PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP				130,000,000	PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP				315,000,000	
	Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota				106,000,000	Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota				265,000,000	
	Pengendalian Pelaksanaan RPPLH Kabupaten/Kota		Jumlah Dokumen Telaahan Kebijakan yang Telah Mengakomodir RPPLH Kabupaten/Kota	1 dokumen	106,000,000	Pengendalian Pelaksanaan RPPLH Kabupaten/Kota		Jumlah Dokumen Telaahan Kebijakan yang Telah Mengakomodir RPPLH Kabupaten/Kota	1 dokumen	265,000,000	Peningkatan kualitas dokumen pelaporan
	Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten/Kota				24,000,000	Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten/Kota				50,000,000	
	Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS Rencana Tata Ruang		Jumlah Dokumen KLHS Rencana Tata Ruang Kabupaten/Kota yang Disusun	1 dokumen	24,000,000	Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS Rencana Tata Ruang		Jumlah Dokumen KLHS Rencana Tata Ruang Kabupaten/Kota yang Disusun	1 dokumen	50,000,000	Peningkatan kualitas dokumen pelaporan
	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP				527,152,000	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP				1.220,000,000	
	Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota				527,152,000	Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota				1.220,000,000	
	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut		Jumlah Dokumen Uji Kualitas Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	2 dokumen	60,000,000	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut		Jumlah Dokumen Uji Kualitas Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	2 dokumen	240,000,000	Meningkatnya jumlah uji air tanah dan udara
	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca,		Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Inventarisasi Gas Rumah Kaca dari Sektor Lingkungan Hidup yang Dilaksanakan	1 dokumen	14,460,000	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca,		Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Inventarisasi Gas Rumah Kaca dari Sektor Lingkungan Hidup yang Dilaksanakan	1 dokumen	250,000,000	Fasilitasi perubahan CA menjadi TWA

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
	Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim					Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim					
	Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota		Jumlah Pengambilan Contoh Uji, Pengujian Parameter Kualitas Lingkungan dan Dokumen Mutu yang Dilaksanakan	2 dokumen	452,692,000	Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota		Jumlah Pengambilan Contoh Uji, Pengujian Parameter Kualitas Lingkungan dan Dokumen Mutu yang Dilaksanakan	2 dokumen	730,000,000	Peningkatan kapasitas operasional laboratorium
	PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)				100,000,000	PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)				200,000,000	
	Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota				100,000,000	Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota				200,000,000	
	Penyusunan dan Penetapan Rencana Pengelolaan Keanekaragaman Hayati		Jumlah Dokumen Rencana Induk Pengelolaan Kehati yang Disusun	1 dokumen	100,000,000	Penyusunan dan Penetapan Rencana Pengelolaan Keanekaragaman Hayati		Jumlah Dokumen Rencana Induk Pengelolaan Kehati yang Disusun	1 dokumen	200,000,000	Peningkatan kualitas data dan informasi terkait kehati
	PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)				20,000,000	PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)				50,000,000	
	Penyimpanan sementara Limbah B3				20,000,000	Penyimpanan sementara Limbah B3				50,000,000	
	Verifikasi Lapangan untuk Memastikan Pemenuhan Persyaratan Administrasi dan Teknis Penyimpanan sementara Limbah B3		Jumlah Laporan Kegiatan Verifikasi Lapangan Pemenuhan Komitmen Persetujuan/Izin Penyimpanan sementara dan Pengumpulan Limbah B3	25 laporan	20,000,000	Verifikasi Lapangan untuk Memastikan Pemenuhan Persyaratan Administrasi dan Teknis Penyimpanan sementara Limbah B3		Jumlah Laporan Kegiatan Verifikasi Lapangan Pemenuhan Persetujuan/Izin Penyimpanan sementara dan Pengumpulan Limbah B3	25 laporan	25,000,000	Peningkatan kualitas data dan pelaporan
	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)				160,000,000	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)				210,000,000	
	Pembinaan dan Pengawasan Terhadap				160,000,000	Pembinaan dan Pengawasan Terhadap				210,000,000	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
	Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota					Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota					
	Pengawasan Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan Hidup, Izin PPLH yang Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah Laporan Dari Usaha dan/atau Kegiatan yang Diawasi Izin Lingkungan, Persetujuan Lingkungan, Surat Kelayakan Operasi oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	30 laporan	160,000,000	Pengawasan Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan Hidup, Izin PPLH yang Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah Laporan Dari Usaha dan/atau Kegiatan yang Diawasi Izin Lingkungan, Persetujuan Lingkungan, Surat Kelayakan Operasi oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	30 laporan	210,000,000	Optimalnya pengawasan kepada pelaku usaha
	PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT				171,000,000	PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT				400,000,000	
	Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota				171,000,000	Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota				400,000,000	
	Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Bidang Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan		Jumlah Lembaga/kelompok Masyarakat/Institusi yang Terdaftar yang Meningkatkan Kapasitas dan Kompetensinya Terkait PPLH	4 lembaga	67,371,000	Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Bidang Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan		Jumlah Lembaga/kelompok Masyarakat/Institusi yang Terdaftar yang Meningkatkan Kapasitas dan Kompetensinya Terkait PPLH	4 lembaga	250,000,000	Meningkatnya kualitas kompetensi SDM
	Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup		Jumlah Pendampingan Pembinaan Gerakan Peduli dan Berbudaya Lingkungan Hidup yang Dilaksanakan	11 dokume	103,629,000	Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup		Jumlah Pendampingan Pembinaan Gerakan Peduli dan Berbudaya Lingkungan Hidup yang Dilaksanakan	11 dokume	150,000,000	Bertambahnya jumlah pendampingan dan pembinaan
	PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT				34,000,000	PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT				100,000,000	
	Pemberian Penghargaan				34,000,000	Pemberian Penghargaan				100,000,000	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
	Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota					Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota					
	Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup		Jumlah Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi yang Dinilai Kinerjanya dalam rangka PPLH	11 entitas	34,000,000	Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup		Jumlah Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi yang Dinilai Kinerjanya dalam rangka PPLH	11 entitas	100,000,000	Peningkatan Jumlah lomba lomba lingkungan Hidup
	PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP				40,000,000	PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP				50,000,000	
	Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota				40,000,000	Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota				50,000,000	
	Pengelolaan Pengaduan Masyarakat Terhadap PPLH Kabupaten/Kota		Jumlah Pengaduan Masyarakat Terhadap PPLH Kabupaten/Kota yang Ditindaklanjuti/Ditangani	15 dokume	40,000,000	Pengelolaan Pengaduan Masyarakat Terhadap PPLH Kabupaten/Kota		Jumlah Pengaduan Masyarakat Terhadap PPLH Kabupaten/Kota yang Ditindaklanjuti/ Ditangani	15 dokume	50,000,000	Pembuatan laporan akhir terkait pengaduan
	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN				5,222,848,000	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN				8,400,000,000	
	Pengelolaan Sampah				5,222,848,000	Pengelolaan Sampah				8,400,000,000	
	Penyusunan Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah Kabupaten/Kota		Jumlah Dokumen Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah Kabupaten/Kota yang Disusun dan Ditetapkan	1 dokumen	87,000,000	Penyusunan Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah Kabupaten/Kota		Jumlah Dokumen Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah Kabupaten/Kota yang Disusun dan Ditetapkan	1 dokumen	100,000,000	Review Jakstrada Pemalang
	Pengurangan Sampah dengan Melakukan Pembatasan, Pendaauran Ulang dan Pemanfaatan Kembali		Jumlah Laporan Hasil Pengurangan Sampah dengan Melakukan Pembatasan, Pendaauran Ulang dan Pemanfaatan Kembali	1 laporan	35,848,000	Pengurangan Sampah dengan Melakukan Pembatasan, Pendaauran Ulang dan Pemanfaatan Kembali		Jumlah Laporan Hasil Pengurangan Sampah dengan Melakukan Pembatasan, Pendaauran Ulang dan Pemanfaatan Kembali	1 laporan	100,000,000	Menambah jumlah sosialisai 3R ke masyarakat
	Penanganan Sampah dengan Melakukan Pemilahan, Pengumpulan,		Jumlah Sampah yang Dipilah, Dikumpulkan, Diangkut, Diolah, Diproses Akhir di	80000 ton	5,035,000,000	Penanganan Sampah dengan Melakukan Pemilahan, Pengumpulan,		Jumlah Sampah yang Dipilah, Dikumpulkan, Diangkut, Diolah, Diproses Akhir di	80000 ton	8,000,000,000	Untuk menambah jumlah ritasi armada

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
	Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir Sampah di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota		TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota			Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir Sampah di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota		TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota			pengangkut sampah
	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota		Jumlah Sarana dan Prasarana Penanganan Sampah untuk Kegiatan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir	110 unit	65,000,000	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota		Jumlah Sarana dan Prasarana Penanganan Sampah untuk Kegiatan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir	110 unit	200,000,000	Mengejar pemenuhan Sarpras yang belum ideal jumlahnya

II.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Berdasarkan Undang-undang Nomor 25 tahun 2004 tentang sistem Perencanaan dan Pembangunan Nasional menyatakan bahwa Pemerintah Daerah wajib menyusun rencana kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang berfungsi sebagai dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun. Dalam menyusun RKPD, pemerintah daerah wajib menyelenggarakan Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) secara berjenjang. Selain itu, berdasarkan Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah menyatakan bahwa pemerintah daerah harus mendorong partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pemerintahan daerah melalui perencanaan pembangunan daerah yaitu Musrenbang pada tingkat desa/kelurahan, kecamatan, kabupaten/kota , provinsi dan Nasional. Melalui Musrenbang diharapkan dapat mensinkronkan dan merekonsiliasikan pendekatan top down dan bottom up.

Tabel. 2.10 Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku
Kepentingan Tahun 2025

No	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran /	Catatan (Ranking)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	(2.11.11) Program Pengelolaan Sampah (2.11.11.2.01) Pengelolaan Sampah (2.11.11.2.01.001) Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan	Desa Pamutih Kec. Ulujami	Pelatihan Pengelolaan Sampah	30 Orang	Musrenbang Kecamatan
2	(2.11.11) Program Pengelolaan Sampah (2.11.11.2.01) Pengelolaan Sampah (2.11.11.2.01.001) Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan	Desa Banjarsari Kec. Bantarbolang	Pelatihan pengolahan sampah menjadi kompos	50 Orang	Musrenbang Kecamatan
3	(2.11.11) Program Pengelolaan Sampah (2.11.11.2.01) Pengelolaan Sampah (2.11.11.2.01.001) Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan	Desa Belik Kec. Belik	Pelatihan pengolahan sampah menjadi kompos	50 Orang	Musrenbang Kecamatan
4	(2.11.11) Program Pengelolaan Sampah (2.11.11.2.01) Pengelolaan Sampah (2.11.11.2.01.001) Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan	Desa Clekatakan Kec. Pulosari	Pelatihan Pengolahan Sampah Organik	30 Orang	Musrenbang Kecamatan
5	(2.11.11) Program Pengelolaan Sampah (2.11.11.2.01) Pengelolaan Sampah (2.11.11.2.01.001) Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan	Desa Kalisaleh Kec. Belik	Pelatihan Pengolahan Sampah Organik	30 Orang	Musrenbang Kecamatan

No	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran /	Catatan (Ranking)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
6	(2.11.11) Program Pengelolaan Sampah (2.11.11.2.01) Pengelolaan Sampah (2.11.11.2.01.001) Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan	Desa Kandang Kec. Comal	Pelatihan Pengolahan Sampah Organik	30 Orang	Musrenbang Kecamatan
7	(2.11.11) Program Pengelolaan Sampah (2.11.11.2.01) Pengelolaan Sampah (2.11.11.2.01.001) Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan	Desa Kebon Gede Kec. Bantarbolang	Pelatihan Pengolahan Sampah Organik	25 Orang	Musrenbang Kecamatan
8	(2.11.11) Program Pengelolaan Sampah (2.11.11.2.01) Pengelolaan Sampah (2.11.11.2.01.001) Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan	Desa Tanahbaya Kec. Randudongkal	Pelatihan Budidaya Magot	30 Orang	Musrenbang Kecamatan
9	(2.11.11) Program Pengelolaan Sampah (2.11.11.2.01) Pengelolaan Sampah (2.11.11.2.01.001) Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan	Desa Warungpring Kec. Warungpring	Pelatihan Pengelolaan Sampah	30 Orang	Musrenbang Kecamatan
10	(2.11.11) Program Pengelolaan Sampah (2.11.11.2.01) Pengelolaan Sampah (2.11.11.2.01.001) Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan	Desa Bulakan Kec. Belik	Pelatihan Pengelolaan Sampah	30 Orang	Musrenbang Kecamatan
11	(2.11.11) Program Pengelolaan Sampah (2.11.11.2.01) Pengelolaan Sampah (2.11.11.2.01.001) Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan	Desa Beluk Kec. Belik	Pelatihan Pengelolaan Sampah	30 Orang	Musrenbang Kecamatan

**BAB 3 TUJUAN DAN SASARAN DINAS LINGKUNGAN HIDUP
KABUPATEN PEMALANG**

III.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional dan Daerah

Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2024 mengusung tema “Peningkatan Produktivitas untuk Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan”. Dokumen RKP Tahun 2024 merupakan penjabaran tahun kelima dari RPJMN Tahun 2020-2024. Pada Tahun 2024, implementasi sasaran dan arah kebijakan pembangunan dituangkan dalam tujuh Prioritas Nasional. Pembangunan lingkungan hidup, ketahanan bencana dan perubahan iklim merupakan Prioritas Nasional 6 dalam RKP Tahun 2024.

Dalam rangka menjaga kelestarian sumber daya alam dan lingkungan hidup untuk menopang produktivitas dan kualitas kehidupan masyarakat menuju transformasi ekonomi hijau yang inklusif dan berkelanjutan serta pembangunan yang berorientasi pada pencegahan, pengurangan risiko dan tangguh bencana, Prioritas Nasional 6 diarahkan pada kebijakan peningkatan kualitas lingkungan hidup, pengelolaan keanekaragaman hayati yang berkelanjutan, peningkatan ketahanan terhadap bencana dan dampak iklim serta pembangunan rendah karbon.

Strategi peningkatan kualitas lingkungan hidup difokuskan pada upaya penanganan beban pencemaran untuk meningkatkan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup. Peningkatan ketahanan bencana dan iklim akan didorong melalui penguatan sistem ketahanan bencana dan sistem peringatan dini bencana. Sedangkan pembangunan rendah karbon diarahkan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi seiring meningkatkan capaian penurunan emisi dan intensitas emisi Gas Rumah Kaca.

Tabel 3.1.
**Sasaran, Indikator dan Target PN 6 Membangun Lingkungan Hidup,
Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim**

No	Sasaran	Target Tahun 2024
1	Meningkatnya Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	
1.1	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (nilai)	69,74
2	Berkurangnya Kerugian Akibat Dampak Bencana dan Bahaya Iklim	
2.1	Penurunan potensi kehilangan PDB akibat dampak bencana dan iklim terhadap total PDB (%)	1,25
3	Meningkatnya capaian penurunan emisi dan intensitas emisi Gas Rumah Kaca (GRK) terhadap baseline	
3.1	Persentase penurunan emisi GRK (%)	27,3
3.2	Persentase penurunan intensitas emisi GRK (%)	31,6

Mengacu pada prioritas dan sasaran Pembangunan Nasional yang tercantum dalam RKP Tahun 2024 ditetapkan prioritas dan sasaran Pembangunan Daerah Kabupaten Pemalang yang dituangkan dalam RKPD Kabupaten Pemalang Tahun 2024.

RKPD Kabupaten Pemalang Tahun 2025 merupakan tahun ke-4 pelaksanaan RPJMD Kabupaten Pemalang Tahun 2021-2026. Tema Pembangunan Kabupaten Pemalang Tahun 2025 adalah Penguatan kebijakan Fasilitas dan koordinasi Pembangunan desa secara partisipatif Perlindungan, Pelestarian, Pengembangan dan Reaktualisasi nilai budaya daerah Penguatan kebijakan Fasilitas dan koordinasi Pembangunan desa secara partisipatif .

Sasaran pembangunan daerah Kabupaten Pemalang untuk sektor lingkungan hidup adalah meningkatnya kualitas dan fungsi lingkungan hidup melalui upaya pencegahan dan pengendalian pencemaran serta peningkatan tutupan lahan.

Berdasarkan tema pembangunan dan sasaran pembangunan Kabupaten Pemalang Tahun 2025 tersebut, prioritas dan fokus pembangunan Kabupaten Pemalang untuk sektor lingkungan hidup adalah peningkatan kualitas lingkungan hidup sebesar 69,67 melalui peningkatan keanekaragaman hayati dan tutupan lahan, pengawasan kualitas udara dan air, peningkatan pengelolaan sampah dengan metode 3R, peningkatan pengelolaan sampah di TPA, penanganan limbah B3, pengawasan usaha/kegiatan lingkungan yang berijin dan penguatan kelompok masyarakat. Hal ini sejalan dengan sasaran dan arah kebijakan Pembangunan Nasional maupun Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Tengah, dimana menempatkan sasaran pembangunan untuk sektor lingkungan hidup pada meningkatnya kualitas lingkungan hidup.

III.2. Tujuan dan sasaran Renja DLH Kabupaten Pemalang.

Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pemalang dalam melaksanakan dan mengemban tugas pokok dan fungsinya harus mampu menerjemahkan Visi Misi Pemerintah Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2021-2026 yakni:

“ Terwujudnya Kabupaten Pemalang yang Adil, Makmur, Agamis dan Ngangeni “

Berkaitan dengan hal tersebut, maka perlu diperhatikan misi pembangunan RPJMD Kabupaten Pemalang tahun 2021-2026 yang terkait dan perlu diaktualisasikan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pemalang, yaitu:

Misi ke 6 : “Mewujudkan Pembangunan Infrastruktur yang kuat dan berkesinambungan”.

Untuk mewujudkan misi keenam sebagaimana yang ditetapkan dalam RPJMD Kabupaten Pemalang Tahun 2021-2026, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pemalang telah menetapkan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yakni meningkatnya kualitas dan fungsi

lingkungan hidup melalui upaya pencegahan dan pengendalian pencemaran serta peningkatan tutupan lahan.

Tabel 3.3
Tujuan dan Sasaran Renja DLH Kabupaten Pemalang Tahun 2025

Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan dan Sasaran	Satuan	Target 2025
1	2	3	4	5
Meningkatkan pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup		Penurunan beban pencemaran dan kerusakan lingkungan	%	69,67
	Terkendalinya sumber pencemar udara	Nilai Indeks Pencemaran Udara	Indeks	89,58
	Terkendalinya sumber pencemar air	Nilai Indeks Pencemaran Air	Indeks	47,83
	Meningkatnya mitigasi terhadap perubahan iklim	Persentase potensi penurunan emisi Gas Rumah Kaca	%	0,4
	Meningkatnya luasan tutupan vegetasi	Persentase luasan Ruang Terbuka Hijau (RTH) Skala Kabupaten	%	43,092
		Persentase penanganan lahan kritis	%	0,0763
		Indeks Kualitas Tutupan Lahan	Indeks	70,20
	Meningkatnya penataan dan penataan lingkungan hidup	Persentase ketersediaan dokumen lingkungan dan kajian teknis lingkungan	%	100
		Persentase usaha/kegiatan yang diawasi dan dibina	%	100
		Penyelesaian pengaduan atas dugaan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup	%	100
	Meningkatnya kepedulian masyarakat terhadap pengelolaan lingkungan hidup	Persentase jumlah kelompok/lembaga/masyarakat yang aktif dalam program penyelamatan lingkungan	%	100
	Meningkatnya pelayanan persampahan	Terpenuhinya akses masyarakat terhadap pelayanan persampahan	%	92,86
	Terkelolanya sampah mulai dari sumbernya	Persentase penanganan sampah	%	70,00
		Persentase pengurangan sampah	%	30,00
Meningkatnya kinerja pelayanan Dinas Lingkungan Hidup		Indeks kepuasan masyarakat terhadap pelayanan Dinas Lingkungan Hidup	%	80,84
	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Dinas Lingkungan Hidup yang efektif, Efisien dan Akuntabel	Nilai SAKIP	nilai	64,01
		Indeks Reformasi Birokrasi	Indeks	55,50

III.3. Program dan Kegiatan

Dalam Rencana Program dan Kegiatan 2025, DLH Kabupaten Pemalang direncanakan berjumlah 10 Program, 17 Kegiatan dan 42 Sub Kegiatan dengan total pagu dana/pagu indikatif sebesar Rp.25.534.000.000,- Rencana Kerja (Program/Kegiatan/Sub Kegiatan) DLH Kabupaten Pemalang Tahun 2025, seperti yang tercantum dalam tabel berikut:

Tabel 3.4
Rencana Program dan Kegiatan DLH Kabupaten Pemalang Tahun 2025

No	Analisa Kebutuhan				
	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif
	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP				
1	PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP				330.000.000
	Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota				200.000.000
	Pengendalian Pelaksanaan RPPLH Kabupaten/Kota		Jumlah Dokumen Telaahan Kebijakan yang Telah Mengakomodir RPPLH Kabupaten /Kota	1 dokumen	200.000.000
	Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten/Kota				130.000.000
	Penyelenggaraan KLHS Rencana Tata Ruang		Jumlah Dokumen KLHS Rencana Tata Ruang Kabupaten/Kota yang Disusun	1 dokumen	130.000.000
2	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP				405.000.000
	Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota				405.000.000
	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut		Jumlah Dokumen Uji Kualitas Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	2 dokumen	70.000.000
	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim		Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Inventarisasi Gas Rumah Kaca dari Sektor Lingkungan Hidup yang Dilaksanakan	1 dokumen	35.000.000
	Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup kabupaten/kota		Jumlah Pengambilan Contoh Uji, Pengujian Parameter Kualitas Lingkungan dan Dokumen Mutu yang Dilaksanakan	2 dokumen	300.000.000
3	PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)				100.000.000
	Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota				100.000.000
	Penyusunan dan Penetapan Rencana Pengelolaan Keanekaragaman Hayati		Jumlah Dokumen Rencana Induk Pengelolaan Kehati yang Disusun	1 dokumen	100.000.000
4	PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)				30.000.000
	Penyimpanan sementara Limbah B3				30.000.000

No	Analisa Kebutuhan				
	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif
	Verifikasi Lapangan untuk Memastikan Pemenuhan Persyaratan Administrasi dan Teknis Penyimpanan sementara Limbah B3		Jumlah Laporan Kegiatan Verifikasi Lapangan Pemenuhan Komitmen Persetujuan/ Izin Penyimpanan sementara dan Pengumpulan Limbah B3	25 laporan	30.000.000
5	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)				75.000.000
	Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota				75.000.000
	Pengawasan Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah terkait Persetujuan Lingkungan yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi dan Peraturan Perundang - undangan di bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup		Jumlah Laporan Dari Usaha dan/ atau Kegiatan yang Diawasi Izin Lingkungan, Persetujuan Lingkungan, Surat Kelayakan Operasi oleh Pemerintah Daerah Kabupaten /Kota	30 laporan	75.000.000
6	PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT				230.000.000
	Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota				230.000.000
	Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup		Jumlah Pendampingan Pembinaan Gerakan Peduli dan Berbudaya Lingkungan Hidup yang Dilaksanakan	11 dokumen	60.000.000
	Penyelenggaraan Penyuluhan dan Kampanye Lingkungan Hidup		Jumlah Masyarakat/Kelompok Masyarakat/Pelaku Usaha/Kegiatan yang terlibat	100 orang	20.000.000
	Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Bidang lingkungan hidup untuk Lembaga pendidikan formal/lembaga masyarakat/komunitas/kelompok masyarakat		Jumlah Lembaga/kelompok Masyarakat/Institusi yang Terdaftar yang Meningkatkan Kapasitas dan Kompetensinya Terkait PPLH	4 lembaga	150.000.000
7	PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT				40.000.000
	Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota				40.000.000
	Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup		Jumlah Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi yang Dinilai Kinerjanya dalam rangka PPLH	11 entitas	40.000.000
8	PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP				20.000.000
	Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota				20.000.000
	Pengelolaan Pengaduan permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup tingkat Kabupaten/Kota		Jumlah Pengaduan Masyarakat Terhadap PPLH Kabupaten/Kota yang Ditindaklanjuti/Ditangani	15 dokumen	20.000.000
9	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN				5.545.000.000

No	Analisa Kebutuhan				
	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif
	Pengelolaan Sampah				5.545.000.000
	Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan		Jumlah Masyarakat, Kelompok Masyarakat atau Para Pihak Lainnya yang Terlibat Aktif dalam Kegiatan Pengelolaan Sampah Berbasis Masyarakat	100 orang	125.000.000
	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota		Jumlah Sarana dan Prasarana Penanganan Sampah untuk Kegiatan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir	110 unit	120.000.000
	Penyusunan Rencana, Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah kabupaten/kota		Jumlah Dokumen Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah Kabupaten/Kota yang Disusun dan Ditetapkan	1 dokumen	200.000.000
	Penanganan sampah melalui pengangkutan		Jumlah Sampah yang Dipilah, Dikumpulkan, Diangkut, Diolah, Diproses Akhir di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	80000 ton	5.000.000.000
	Pengurangan sampah melalui pendauran ulang sampah		Jumlah Laporan Hasil Pengurangan Sampah dengan Melakukan Pembatasan, Pendaauran Ulang dan Pemanfaatan Kembali	1 laporan	100.000.000
10	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				18.759.000.000
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				25.000.000
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 dokumen	15.000.000
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 laporan	10.000.000
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				13.930.000.000
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	172 orang	13.900.000.000
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD		Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 dokumen	10.000.000
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD		Jumlah Laporan Keuanga Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan La Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	1 dokumen	10.000.000
	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran		Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1 dokumen	10.000.000
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				140.000.000

No	Analisa Kebutuhan				
	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif
	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya		Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	1 Paket	60.000.000
	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai		Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	1 dokumen	80.000.000
	Administrasi Umum Perangkat Daerah				400.000.000
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 paket	10.000.000
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 paket	15.000.000
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 paket	160.000.000
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan		Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 paket	25.000.000
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan		Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan yang Disediakan	1 dokumen	10.000.000
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Jumlah laporan penyelenggaraan rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	200 laporan	180.000.000
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				30.000.000
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	2 unit	30.000.000
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				4.018.000.000
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat		Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat	2500 laporan	8.000.000
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 laporan	180.000.000
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 laporan	3.830.000.000
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				216.000.000
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	28 unit	100.000.000
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	9 unit	8.000.000
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	3 unit	100.000.000
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	12 unit	8.000.000

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN
DLH KABUPATEN PEMALANG

IV.1 Rencana Pendanaan

Rencana kerja dan pendanaan tahun 2025 berisi program dan kegiatan serta pagu indikatif, yang dirancang untuk mendukung terwujudnya capaian visi, misi dan tujuan RPJMD Kabupaten Pemalang 2021-2026 dan untuk pemenuhan pelayanan Perangkat Daerah dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah. Untuk mewujudkan visi pembangunan Kabupaten Pemalang 2021-2026, yaitu **“Terwujudnya Kabupaten Pemalang yang Adil, Makmur, Agamis dan Ngangeni”** yang ditempuh melalui enam misi.

Oleh Karena itu untuk menerjemahkan Visi dan Misi pada RPJMD Kabupaten Pemalang ke dalam tujuan dan sasaran pembangunan daerah selama 5 (lima) tahun sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pemalang, maka dapat ditelaah dari Misi ke 6 (enam) yaitu **“Mewujudkan pembangunan infrastruktur yang kuat dan berkesinambungan”** dan Tujuan dari RPJMD Kabupaten Pemalang yaitu Misi ini ditujukan untuk **“mewujudkan infrastruktur yang mantap dengan tetap memperhatikan kelestarian lingkungan hidup”**.

Selaku Perangkat Daerah yang menunjang urusan pemerintahan di bidang Lingkungan Hidup, DLH Kabupaten Pemalang melaksanakan Prioritas Pembangunan sebagaimana tertuang dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2025 adalah melaksanakan tugas dan mengkoordinasikan penyusunan, pengendalian, dan evaluasi pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah yang efektif, efisien, dan terintegrasi melalui proses perencanaan secara teknokratik, partisipatif, politik, bottom up dan top down dan pendekatan tematik, holistic, integrative, dan spasial.

Rencana Kerja Perangkat Daerah dan Pendanaan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pemalang Tahun 2025 untuk pemenuhan pelayanan Perangkat daerah dalam menyelenggarakan urusan pemerintah daerah, adalah sebagaimana Tabel 4.1

Tabel 4.1 Usulan Program Kegiatan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pemalang Tahun 2025

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
							Target 2025	Pagu Indikatif	Lokasi	Prioritas			Target	Pagu Indikatif
										Nasional	Daerah			
Dinas Lingkungan Hidup														
2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			24.876.273.000,00						26.160.000.000
2	11				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP			24.876.273.000,00						26.160.000.000
2	11	02			PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP			125.000.000,00						400.000.000
2	11	02	201		Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota			50.000.000,00						250.000.000
2	11	02	201	0002	Pengendalian Pelaksanaan RPPLH Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Telaahan Kebijakan yang Telah Mengakomodir RPPLH Kabupaten /Kota	1 dokumen	50.000.000,00			2. Pembangunan SDM berkarakter budaya unggul		1 dokumen	250.000.000
2	11	02	202		Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten/Kota			75.000.000,00						150.000.000
2	11	02	202	0005	Penyelenggaraan KLHS Rencana Tata Ruang	Jumlah Dokumen KLHS Rencana Tata Ruang Kabupaten/Kota yang Disusun	1 dokumen	75.000.000,00			2. Pembangunan SDM berkarakter budaya unggul		1 dokumen	150.000.000
2	11	03			PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP			150.000.000,00						455.000.000
2	11	03	201		Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota			150.000.000,00						455.000.000
2	11	03	201	0001	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	Jumlah Dokumen Uji Kualitas Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	2 dokumen	75.000.000,00			2. Pembangunan SDM berkarakter budaya unggul		2 dokumen	80.000.000

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
							Target 2025	Pagu Indikatif	Lokasi	Prioritas		Target		Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
Dinas Lingkungan Hidup															
2	11	03	201	0002	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Inventarisasi Gas Rumah Kaca dari Sektor Lingkungan Hidup yang Dilaksanakan	1 dokumen	25.000.000,00			2. Pembangunan SDM berkarakter budaya unggul		1 dokumen	75.000.000	
2	11	03	201	0015	Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup kabupaten/kota	Jumlah Pengambilan Contoh Uji, Pengujian Parameter Kualitas Lingkungan dan Dokumen Mutu yang Dilaksanakan	2 dokumen	50.000.000,00			2. Pembangunan SDM berkarakter budaya unggul		2 dokumen	300.000.000	
2	11	04			PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)			0,00						100.000.000	
2	11	04	201		Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota			0,00						100.000.000	
2	11	04	201	0001	Penyusunan dan Penetapan Rencana Pengelolaan Keanekaragaman Hayati	Jumlah Dokumen Rencana Induk Pengelolaan Kehati yang Disusun	1 dokumen	0,00			2. Pembangunan SDM berkarakter budaya unggul		1 dokumen	100.000.000	
2	11	05			PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)			0,00						30.000.000	
2	11	05	201		Penyimpanan sementara Limbah B3			0,00						30.000.000	
2	11	05	201	0002	Verifikasi Lapangan untuk Memastikan Pemenuhan Persyaratan Administrasi dan Teknis Penyimpanan sementara Limbah B3	Jumlah Laporan Kegiatan Verifikasi Lapangan Pemenuhan Komitmen Persetujuan/ Izin Penyimpanan sementara dan Pengumpulan Limbah B3	25 laporan	0,00			2. Pembangunan SDM berkarakter budaya unggul		25 laporan	30.000.000	
2	11	06			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)			19.975.000,00						85.000.000	

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
							Target 2025	Pagu Indikatif	Lokasi	Prioritas		Target		Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
Dinas Lingkungan Hidup															
2	11	06	201		Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota			19.975.000,00							85.000.000
2	11	06	201	0005	Pengawasan Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah terkait Persetujuan Lingkungan yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi dan Peraturan Perundang - undangan di bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Jumlah Laporan Dari Usaha dan/ atau Kegiatan yang Diawasi Izin Lingkungan, Persetujuan Lingkungan, Surat Kelayakan Operasi oleh Pemerintah Daerah Kabupaten /Kota	30 laporan	19.975.000,00			2. Pembangunan SDM berkarakter budaya unggul		30 laporan		85.000.000
2	11	08			PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT			803.188.000,00							230.000.000
2	11	08	201		Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			803.188.000,00							280.000.000
2	11	08	201	0002	Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup	Jumlah Pendampingan Pembinaan Gerakan Peduli dan Berbudaya Lingkungan Hidup yang Dilaksanakan	11 dokumen	300.438.000,00			2. Pembangunan SDM berkarakter budaya unggul		11 dokumen		80.000.000
2	11	08	201	0003	Penyelenggaraan Penyuluhan dan Kampanye Lingkungan Hidup	Jumlah Masyarakat/Kelompok Masyarakat/Pelaku Usaha/Kegiatan yang terlibat	100 orang	102.750.000,00			2. Pembangunan SDM berkarakter budaya unggul		100 orang		50.000.000
2	11	08	201	0005	Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Bidang lingkungan hidup untuk Lembaga pendidikan formal/lembaga masyarakat/komunitas/kelompok masyarakat	Jumlah Lembaga/kelompok Masyarakat/Institusi yang Terdaftar yang Meningkatkan Kapasitas dan Kompetensinya Terkait PPLH	4 lembaga	400.000.000,00			2. Pembangunan SDM berkarakter budaya unggul		4 lembaga		150.000.000
2	11	09			PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT			0,00							40.000.000

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
							Target 2025	Pagu Indikatif	Lokasi	Prioritas			Target	Pagu Indikatif
										Nasional	Daerah			
Dinas Lingkungan Hidup														
2	11	09	201		Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			0,00						40.000.000
2	11	09	201	0001	Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Jumlah Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi yang Dinilai Kinerjanya dalam rangka PPLH	11 entitas	0,00			2. Pembangunan SDM berkarakter budaya unggul		11 entitas	40.000.000
2	11	10			PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP			5.025.000,00						20.000.000
2	11	10	201		Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota			5.025.000,00						20.000.000
2	11	10	201	0004	Pengelolaan Pengaduan permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Pengaduan Masyarakat Terhadap PPLH Kabupaten/Kota yang Ditindaklanjuti/Ditangani	15 dokumen	5.025.000,00			2. Pembangunan SDM berkarakter budaya unggul		15 dokumen	20.000.000
2	11	11			PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN			4.943.532.000,00						6.000.000.000
2	11	11	201		Pengelolaan Sampah			4.943.532.000,00						6.000.000.000
2	11	11	201	0004	Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan	Jumlah Masyarakat, Kelompok Masyarakat atau Para Pihak Lainnya yang Terlibat Aktif dalam Kegiatan Pengelolaan Sampah Berbasis Masyarakat	100 orang	460.000.000,00			2. Pembangunan SDM berkarakter budaya unggul		100 orang	130.000.000
2	11	11	201	0007	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana dan Prasarana Penanganan Sampah untuk Kegiatan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir	110 unit	860.000.000,00			2. Pembangunan SDM berkarakter budaya unggul		110 unit	120.000.000

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
							Target 2025	Pagu Indikatif	Lokasi	Prioritas		Target		Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
Dinas Lingkungan Hidup															
2	11	11	201	0008	Penyusunan Rencana, Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah kabupaten/kota	Jumlah Dokumen Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah Kabupaten/Kota yang Disusun dan Ditetapkan	1 dokumen	0,00			2. Pembangunan SDM berkarakter budaya unggul		1 dokumen	200.000.000	
2	11	11	201	0012	Penanganan sampah melalui pengangkutan	Jumlah Sampah yang Dipilah, Dikumpulkan, Diangkut, Diolah, Diproses Akhir di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	80000 ton	3.623.532.000,00			2. Pembangunan SDM berkarakter budaya unggul		80000 ton	5.450.000.000	
2	11	11	201	0019	Pengurangan sampah melalui pendauran ulang sampah	Jumlah Laporan Hasil Pengurangan Sampah dengan Melakukan Pembatasan, Pendaauran Ulang dan Pemanfaatan Kembali	1 laporan	0,00			2. Pembangunan SDM berkarakter budaya unggul		1 laporan	100.000.000	
2	11	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			18.829.553.000,00						18.800.000.000	
2	11	01	201		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			18.200.000,00						30.000.000	
2	11	01	201	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 dokumen	14.000.000,00			2. Pembangunan SDM berkarakter budaya unggul		2 dokumen	20.000.000	
2	11	01	201	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 laporan	4.200.000,00			2. Pembangunan SDM berkarakter budaya unggul		1 laporan	10.000.000	
2	11	01	202		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			14.253.441.000,00						13.930.000.000	
2	11	01	202	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	172 orang	14.241.641.000,00			2. Pembangunan SDM		172 orang	13.900.000.000	

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
							Target 2025	Pagu Indikatif	Lokasi	Prioritas			Target	Pagu Indikatif
										Nasional	Daerah			
Dinas Lingkungan Hidup														
											berkarakter budaya unggul			
2	11	01	202	0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 dokumen	3.800.000,00			2. Pembangunan SDM berkarakter budaya unggul		1 dokumen	10.000.000
2	11	01	202	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuanga Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan La Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	1 dokumen	5.500.000,00			2. Pembangunan SDM berkarakter budaya unggul		1 dokumen	10.000.000
2	11	01	202	0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1 dokumen	2.500.000,00			2. Pembangunan SDM berkarakter budaya unggul		1 dokumen	10.000.000
2	11	01	205		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			50.000.000,00						150.000.000
2	11	01	205	0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	1 Paket	0,00			2. Pembangunan SDM berkarakter budaya unggul		1 Paket	60.000.000
2	11	01	205	0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	1 dokumen	50.000.000,00			2. Pembangunan SDM berkarakter budaya unggul		1 dokumen	90.000.000
2	11	01	206		Administrasi Umum Perangkat Daerah			325.980.000,00						400.000.000
2	11	01	206	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 paket	5.000.000,00			2. Pembangunan SDM berkarakter budaya unggul		1 paket	10.000.000

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
							Target 2025	Pagu Indikatif	Lokasi	Prioritas		Target		Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
Dinas Lingkungan Hidup															
2	11	01	206	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 paket	8.630.000,00			2. Pembangunan SDM berkarakter budaya unggul		1 paket	15.000.000	
2	11	01	206	0003	Penyediaan Peralatan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 paket	4.000.000,00			2. Pembangunan SDM berkarakter budaya unggul				
2	11	01	206	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 paket	130.000.000,00			2. Pembangunan SDM berkarakter budaya unggul		1 paket	160.000.000	
2	11	01	206	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 paket	15.000.000,00			2. Pembangunan SDM berkarakter budaya unggul		1 paket	25.000.000	
2	11	01	206	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan yang Disediakan	1 dokumen	13.350.000,00			2. Pembangunan SDM berkarakter budaya unggul		1 dokumen	10.000.000	
2	11	01	206	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	200 laporan	150.000.000,00			2. Pembangunan SDM berkarakter budaya unggul		200 laporan	180.000.000	
2	11	01	207		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			24.480.000,00						50.000.000	
2	11	01	207	0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	2 unit	24.480.000,00			2. Pembangunan SDM berkarakter budaya unggul		2 unit	50.000.000	
2	11	01	208		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			4.005.425.000,00						4.020.000.000	

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
							Target 2025	Pagu Indikatif	Lokasi	Prioritas		Target		Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
Dinas Lingkungan Hidup															
2	11	01	208	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat	2500 laporan	6.000.000,00			2. Pembangunan SDM berkarakter budaya unggul		2500 laporan	10.000.000	
2	11	01	208	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 laporan	251.609.000,00			2. Pembangunan SDM berkarakter budaya unggul		12 laporan	180.000.000	
2	11	01	208	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 laporan	3.747.816.000,00			2. Pembangunan SDM berkarakter budaya unggul		12 laporan	3.830.000.000	
2	11	01	209		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			152.027.000,00						220.000.000	
2	11	01	209	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	28 unit	90.000.000,00			2. Pembangunan SDM berkarakter budaya unggul		28 unit	100.000.000	
2	11	01	209	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	9 unit	3.000.000,00			2. Pembangunan SDM berkarakter budaya unggul		9 unit	10.000.000	
2	11	01	209	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	3 unit	5.460.000,00			2. Pembangunan SDM berkarakter budaya unggul		3 unit	100.000.000	
2	11	01	209	0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	12 unit	46.677.000,00			2. Pembangunan SDM berkarakter budaya unggul		12 unit	10.000.000	
Jumlah								24.876.273.000,00						26.160.000.000	

BAB V PENUTUP

Rancangan Awal RENJA DLH Kabupaten Pemalang Tahun 2025, merupakan perencanaan tahunan yang sifatnya lebih operasional dan mempunyai strategis yaitu menjembatani antara perencanaan pada DLH dengan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD), sebagai implementasi pelaksanaan strategis jangka menengah (RPJMD) daerah dan Renstra DLH yang menjadi satu kesatuan untuk mendukung pencapaian visi, misi daerah.

Rancangan Awal RENJA DLH Kabupaten Pemalang selain sebagai pedoman pelaksanaan program dan kegiatan untuk tahun 2025 juga berfungsi sebagai sarana peningkatan kinerja DLH Kabupaten Pemalang. Untuk dapat merealisasikan program dan kegiatan yang nantinya akan ditetapkan dalam RENJA DLH Kabupaten Pemalang tentu juga dipengaruhi oleh sumber pembiayaan / pendanaan yang memadai serta kompetensi dan semangat, tekad serta kedisiplinan dalam memprioritaskan program dan kegiatan sesuai dengan anggaran yang tersedia. Oleh karena itu penyelenggaraan seluruh program dan kegiatan yang direncanakan dalam RENJA DLH Kabupaten Pemalang akan mengikuti petunjuk dan aturan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Pemalang.

V.1 Kaidah-kaidah Pelaksanaan

Agar pelaksanaan program dan kegiatan dalam Rancangan awal RENJA DLH Kabupaten Pemalang Tahun 2025 dapat berjalan efektif, efisien dan akuntabel maka disusun kaidah-kaidah pelaksanaannya, sebagai berikut :

- a. DLH Kabupaten Pemalang berkewajiban untuk mengimplementasikan pencapaian tujuan, sasaran, program, kegiatan yang akan dirumuskan dalam Renja DLH Tahun 2025 setelah diselaraskan dengan RKPD Kabupaten Pemalang Tahun 2025;
- b. DLH Kabupaten Pemalang berkewajiban untuk menyusun Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Tahun 2025 dengan berpedoman kepada Renja DLH Tahun 2025 dan RKPD Kabupaten Pemalang Tahun 2025.
- c. Dalam rangka meningkatkan efektivitas pelaksanaan Renja DLH Kabupaten Pemalang Tahun 2025, Kepala DLH Kabupaten Pemalang wajib melaksanakan pengendalian dan evaluasi program dan kegiatan tahun 2025.
- d. Hal-hal lain yang tidak diatur dalam kaidah pelaksanaan ini, dapat dilakukan sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

V.2 Rencana Tindak Lanjut

Sebagai tindak lanjut disusunnya Rancangan Awal RENJA DLH Kabupaten Pemalang Tahun 2025 ini, maka:

- a. Koordinasi yang intensif antara unsur eksekutif dan legislatif perlu ditingkatkan agar perencanaan program dan kegiatan Tahun 2025 dapat berjalan lancar.
- b. Demi kesempurnaan dokumen ini, maka saran dan kritik yang membangun sangat kami harapkan. Kami juga berharap agar dokumen ini dapat digunakan sebagai dasar dan bahan pertimbangan dalam merumuskan program/kegiatan urusan lingkungan hidup tahun 2025.

Akhirnya, kami ucapkan terima kasih disampaikan kepada seluruh pihak yang terlibat dalam penyusunan dokumen ini.

Pemalang, Juli 2024

KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP
KABUPATEN PEMALANG



WIFI MULYATI, S.K.M
NIP. 19700131 199303 2 003



BUPATI PEMALANG
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI PEMALANG
NOMOR : / /TAHUN 2024

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RENCANA KERJA
DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN PEMALANG TAHUN 2025

BUPATI PEMALANG,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan, pengelolaan pembangunan dan pelayanan masyarakat, diperlukan Rencana Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pemalang Tahun 2025;

b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 125 huruf a Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, dalam tahapan persiapan penyusunan Rencana Kerja, perangkat daerah menyusun rancangan keputusan Kepala Daerah tentang Pembentukan Tim Penyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati Pemalang tentang Pembentukan Tim Penyusun Rencana Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pemalang Tahun 2025;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;

3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Tim Penyusun Rencana Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pematang Tahun 2025, dengan susunan tim sebagaimana tercantum pada Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. mengumpulkan data dan informasi yang diperlukan dalam penyusunan Rencana Kerja;
 - b. merumuskan dan Menyusun dokumen Rencana Kerja Tahun 2025 sesuai tahapan dan tata cara termasuk melakukan pengendalian penyusunan kebijakan dokumen rencana perangkat daerah;
- KETIGA : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU Keputusan ini, bertanggung jawab kepada Bupati Pematang melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Pematang.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pematang.
- KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pematang
pada tanggal

BUPATI PEMALANG,



MANSUR HIDAYAT

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI PEMALANG
NOMOR : / /TAHUN 2024
TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN
RENCANA KERJA DINAS LINGKUNGAN
HIDUP KABUPATEN PEMALANG TAHUN 2025

SUSUNAN TIM PENYUSUN RENCANA KERJA
DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN PEMALANG

NO	JABATAN	KEDUDUKAN	KETERANGAN
1.	Kepala Dinas Lingkungan Hidup	Ketua	
2.	Sekretaris Dinas Lingkungan Hidup	Sekretaris	
3.	Kepala Bidang Penataan, Penaatan dan Peningkatan Kapasitas pada Dinas Lingkungan Hidup	Anggota	
4.	Kepala Bidang Pengendalian dan Konservasi Lingkungan pada Dinas Lingkungan Hidup	Anggota	
5.	Kasubag. Bina Program dan Keuangan pada Dinas Lingkungan Hidup	Anggota	
6.	Kasubag. Umum dan Kepegawaian pada Dinas Lingkungan Hidup	Anggota	
7.	Kepala Unit Kebersihan dan Persampahan pada Dinas Lingkungan Hidup	Anggota	
8.	Kasubag. TU Unit Kebersihan dan Persampahan pada Dinas Lingkungan Hidup	Anggota	
9.	Kepala Laboratorium Lingkungan pada Dinas Lingkungan Hidup	Anggota	
10	Kepala Subbagian Tata Usaha pada Laboratorium Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup	Anggota	
11.	Analisis Kebijakan Ahli Muda pada Dinas Lingkungan Hidup	Anggota	Umar Sidik, S.IP
12.	Pengendali Dampak Lingkungan Hidup Ahli Muda pada Dinas Lingkungan Hidup	Anggota	Inayati Ainah, S.Si
13.	Pengawas Lingkungan Hidup Ahli Muda pada Dinas Lingkungan Hidup	Anggota	Siamatun, S.H
14.	Pengendali Dampak Lingkungan Ahli Pertama pada Dinas Lingkungan Hidup	Anggota	Agus Aribowo, S.T
15.	Pengendali Dampak Lingkungan Ahli Pertama pada Dinas Lingkungan Hidup	Anggota	Riyani Anggarini, S.T
16.	Pengendali Dampak Lingkungan Ahli Pertama pada Dinas Lingkungan Hidup	Anggota	Salasatun Atminingtyas, S.T

NO	JABATAN	KEDUDUKAN	KETERANGAN
17.	Pengawas Lingkungan Hidup Ahli Pertama pada Dinas Lingkungan Hidup	Anggota	Elvira Astriana Sari, S.T
18.	Pengawas Lingkungan Hidup Ahli Pertama pada Dinas Lingkungan Hidup	Anggota	Redina Restiani, S.T
19.	Teknik Penyehatan Lingkungan Ahli Pertama pada Dinas Lingkungan Hidup	Anggota	Andika Bimaseta, S.T
20.	Pranata Komputer pada Dinas Lingkungan Hidup	Anggota	Fikfik Victor A, A.Md
21.	Pranata Laporan Keuangan pada Dinas Lingkungan Hidup	Anggota	Koriyah, A.Md

BUPATI PEMALANG,



MANSUR HIDAYAT

**Pengendalian dan Evaluasi terhadap Kebijakan Renja Dinas Lingkungan Hidup
Kabupaten Pemalang
Tahun 2025**

No	Jenis Kegiatan	Hasil Pengendalian dan Evaluasi			
		Kesesuaian		Faktor Penyebab Ketidaksesuaian	Tindak Lanjut Penyempurnaan Apabila Tidak
		Ada	Tidak Ada		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Pembentukan tim penyusun Renja Perangkat Daerah dan Penyusunan Agenda Kerja.				
2.	Pengolahan data dan informasi.				
3.	Analisis gambaran pelayanan Perangkat Daerah kabupaten /kota.				
4.	Mengkaji hasil evaluasi Renja-Perangkat Daerah kabupaten/kota tahun lalu berdasarkan - Renstra Perangkat Daerah kabupaten/kota				
5.	Penentuan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah kabupaten/kota.				
6.	Penelaahan rancangan awal RKPD kabupaten/kota.				
7.	Perumusan tujuan dan sasaran.				
8.	Penelaahan usulan masyarakat.				
9.	Perumusan kegiatan prioritas.				
10.	Pelaksanaan forum Perangkat Daerah kabupaten/kota.				
10.a	Menyelaraskan program dan kegiatan Perangkat Daerah kabupaten/kota dengan usulan program dan kegiatan hasil Musrenbang kecamatan.				
10.b	Mempertajam indikator dan target kinerja program dan kegiatan Perangkat Daerah kabupaten/kota sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah kabupaten/kota.				
10.c	Mensinkronkan program dan kegiatan antar Perangkat Daerah kabupaten/kota dalam rangka optimalisasi pencapaian sasaran sesuai dengan kewenangan dan sinergitas pelaksanaan.				
10.d	Menyesuaikan pendanaan program dan kegiatan prioritas berdasarkan pagu indikatif untuk masingmasing Perangkat Daerah kabupaten/kota sesuai surat edaran bupati/wali kota.				
11.	Sasaran program dan kegiatan Perangkat Daerah kabupaten/kota disusun berdasarkan pendekatan				

No	Jenis Kegiatan	Hasil Pengendalian dan Evaluasi			
		Kesesuaian		Faktor Penyebab Ketidaksesuaian	Tindak Lanjut Penyempurnaan Apabila Tidak
		Ada	Tidak Ada		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	kinerja, perencanaan dan penganggaran terpadu.				
12.	Program dan kegiatan antar Perangkat Daerah kabupaten/kota dengan Perangkat Daerah lainnya dalam rangka optimalisasi pencapaian sasaran prioritas pembangunan daerah telah dibahas dalam forum Perangkat Daerah kabupaten/kota.				
13.	Pendanaan program dan kegiatan prioritas berdasarkan pagu indikatif untuk masing-masing Perangkat Daerah kabupaten/kota telah menyusun dan memperhitungkan prakiraan maju				
14.	Dokumen Renja Perangkat Daerah kabupaten/kota yang telah disyahkan.				

Pemalang, Juli 2024
KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP
KABUPATEN PEMALANG

WIJI MULYATI, S.K.M
Pembina
NIP. 19700131 199303 2 003